



PENGOLAHAN: Petugas memilih sampah anorganik di TPS3R Nitikan, Umbulherjo, Jogja, kemarin (25/3). Imbas Penutupan TPST Piyungan WALHI Jogjakarta mengkritisi rencana pengolahan sampah dengan teknologi RDF. Teknologi itu dianggap belum menjadi solusi masalah sampah di DI.

Teknologi RDF Belum Jadi Solusi

DLHK DIJ : Kritik WALHI Bahan Evaluasi Atasi Sampah

JOGJA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jogjakarta mengkritisi ramai pengolahan sampah dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) menyusul rencana penerapan desentralisasi sampah di DIJ imbas kebijakan penutupan TPST Piyungan secara permanen. Teknologi tersebut, dianggap belum menjadi solusi permasalahan sampah.

Kadiv Kampanye WALHI Jogjakarta Elki Setiyo Hadi mengatakan, alih-alih melakukan pengelolaan dan pemulihan lingkungan, pemerintah justru memilih menggunakan sampah-sampah yang ada di TPST Piyungan untuk RDF. Padahal bahan anorganik yang digunakan untuk membuat RDF sendiri merupakan sampah anorganik yang mempunyai kriteria tertentu. Sehingga, tidak semua sampah dapat diolah.

Apabila sampah anorganik diproduksi dengan skala masif, tidak menutup kemungkinan justru sampah yang tidak sesuai kriteria tetap tidak terolah. "Dan di sisi lain justru akan terjadi impor sampah," katanya, kemarin (25/3). Elki menjelaskan seperti di beberapa wilayah yang telah menggunakan teknologi RDF. Pembakaran RDF juga tidak menutup kemungkinan dapat berakibat pada terjadinya pelepasan karbon ke udara yang semakin memperparah terjadinya perubahan iklim. Terlebih, sebagian lahan TPST Piyungan rencananya akan digunakan sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk Kota Jogja. Hasil dari pengolahan tersebut rencananya akan berbentuk RDF yang digunakan campuran batu bara.

RDF merupakan hasil pengolahan sampah kering untuk menurunkan kadar air hingga

<25 persen dan menaikkan nilai kalorinya. Rencana tersebut ditolak oleh warga di sekitar TPST Piyungan. Proyek-proyek pengolahan sampah sebelumnya telah merugikan warga, sehingga penolakan yang dilakukan oleh warga hari ini bukan tanpa sebab. "Warga di sekitar TPA Piyungan adalah pihak yang paling dirugikan, khususnya keraguan pada dampak-dampak lingkungannya. Selama 30 tahun masyarakat di sekitar TPA Piyungan mengalami dampak negatif lingkungan hidup yang signifikan terutama terkait pencemaran air," ujarnya.

Menurutnya, ketelitian masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena paradigma desentralistik seharusnya dapat melibatkan semua elemen termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar TPST Piyungan. Salah satu dampak keraguan lingkungan yang dialami warga adalah samun-surun warga yang tercemar air lindi dan penumpukan sampah yang dirasakan masyarakat lokal TPA.

Pada hal berdasarkan UU Nomor 18 / 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan penanganan sampah di sumbernya merupakan prioritas utama. Hal ini, diperlengkapi turunan aturan teknis dari Perpres/Perghub/Perda dengan jelas dalam menjelaskan pengelolaan sampah seperti pengurangan dan penanganan sampah. "Sehingga sektor-sektor tertentu seperti kawasan komersial dan kawasan industri dapat menanggapi tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan," jelasnya.

Berkaitan dengan hal itu, WALHI Jogjakarta mendorong Pemprov DIJ serius mempertimbangkan penerapan paradigma desentralistik dalam pengelolaan sampah dengan memberikan rekomendasi, pendekatan melibatkan aktifnya pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta dalam

merancang solusi yang sesuai dengan karakteristik setempat.

Kedua, WALHI Jogjakarta mendesak pemerintah untuk memberikan informasi terbuka mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi penutupan sampah di daerah tertentu, termasuk dampak dari penutupan TPST Piyungan.

Mereka menilai informasi yang transparan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah. Ketiga, WALHI Jogjakarta menekankan pada partisipasi aktif masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas solusi yang diterapkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Keutuhan (DLHK) DIJ Kusno Wibowo membenarkan, jika wilayah yakni Sleman, Bantul, dan Kota Jogja telah sepekat melakukan pengolahan sampah berteknologi RDE Kabupaten Sleman telah lebih dulu melakukan kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SB) di Cilacap, Jawa Tengah. Dan menyusul Kota Jogja penandatanganan dengan PT yang sama. Kemudian di Pasar Nitan Bantul juga pengolahan sampah berupa RDF 5 ton per hari.

Hanya memang kalau untuk pengolahan sampah tersebut sementara yang masih dianggap baik yaitu hasil produknya adalah RDF untuk supply bahan bakar di pabrik semen. "Jadi untuk substitusi (pengganti) yang biasanya pabrik semen itu menggunakan batu bara ini disubstitusi sebagian dengan RDF ini. Tentunya yang di pabrik semen juga sudah punya substitusinya. Namun demikian kalau ada masukan dari WALHI terimakasih nanti menjadi bahan evaluasi juga bagi kami," katanya. (wla/din)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Lingkungan Hidup | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005